

Akuntansi Publik dan Fiscal Sustainability: Kajian Literatur Sistematis tentang Peran Transparansi Informasi dalam Tata Kelola Fiskal

Adolf Z.D. Siahay✉

Universitas Cenderawasih, Indonesia

Abstrak

Ketidakpastian fiskal global dan lemahnya pengelolaan keuangan publik menuntut reformasi dalam sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi publik dipercaya dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan transparansi fiskal dan mendorong keberlanjutan fiskal negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akuntansi publik sebagai instrumen penguatan fiskal sustainability melalui pendekatan kajian literatur sistematis. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif dengan metode systematic literature review (SLR). Literatur diperoleh melalui pencarian daring yang sistematis di berbagai database akademik terindeks seperti Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Emerald, Google Scholar, dan SINTA, dengan rentang tahun publikasi 2003 hingga 2023. Proses seleksi dilakukan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat terhadap literatur ilmiah yang relevan dan dapat diakses secara penuh. Total 40 artikel ilmiah terpilih, terdiri atas 20 artikel nasional dan 20 artikel internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi publik, khususnya yang berbasis akrual dan didukung oleh transparansi informasi, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan fiskal, mengungkap kewajiban jangka panjang secara akurat, serta memperkuat disiplin anggaran pemerintah. Transparansi informasi terbukti menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam memperkuat pengaruh akuntansi publik terhadap fiskal sustainability. Kajian ini menyimpulkan bahwa reformasi akuntansi publik perlu disertai dengan peningkatan kapasitas institusional, keterbukaan informasi, dan integrasi sistem informasi dalam proses pengambilan keputusan fiskal.

Kata Kunci: Akuntansi Publik, Transparansi Informasi, Fiscal Sustainability, Pelaporan Keuangan, Tata Kelola Publik.

Abstract

Global fiscal uncertainty and weak public financial management require reforms in the public sector accounting system. Public accounting is believed to play a strategic role in creating fiscal transparency and promoting fiscal sustainability in countries. This study aims to examine the role of public accounting as an instrument for strengthening fiscal sustainability through a systematic literature review approach. This study is a qualitative descriptive study using the systematic literature review (SLR) method. Literature was obtained through a systematic online search in various indexed academic databases such as Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Emerald, Google Scholar, and SINTA, with a publication range from 2003 to 2023. The selection process was conducted using strict inclusion and exclusion criteria for relevant and fully accessible scientific literature. A total of 40 scientific articles were selected, consisting of 20 national articles and 20 international articles. The results of the study indicate that public accounting, particularly accrual-based accounting supported by information transparency, plays a significant role in improving the quality of fiscal planning, accurately revealing long-term liabilities, and strengthening government budget discipline. Information transparency was found to be a significant mediating variable in strengthening the influence of public accounting on fiscal sustainability. This study concludes that public accounting reform needs to be accompanied by institutional capacity building, information disclosure, and integration of information systems in the fiscal decision-making process.

Keywords: Public Accounting, Information Transparency, Fiscal Sustainability, Financial Reporting, Public Governance.

Copyright (c) 2023 Adolf Z.D. Siahay

✉ Corresponding author :

Email Address : asiahay1011@gmail.com

INTRODUCTION

Stabilitas fiskal (fiscal sustainability) merupakan isu sentral dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tekanan fiskal jangka panjang akibat pertumbuhan belanja, utang publik, serta ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks Indonesia dan berbagai negara berkembang, ketergantungan pada pembiayaan defisit yang tinggi dan lemahnya pengelolaan fiskal jangka panjang telah menimbulkan risiko terhadap kesinambungan fiskal (International Monetary Fund [IMF], 2022). Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang mampu mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, salah satunya melalui penguatan praktik akuntansi publik. Kajian ini menjadi mendesak untuk dilakukan guna memahami bagaimana akuntansi publik dapat memainkan peran strategis dalam membangun ketahanan fiskal negara.

Pemilihan akuntansi publik sebagai objek kajian didasarkan pada fungsinya yang tidak hanya sebatas pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan fiskal dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi publik menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan untuk berbagai pemangku kepentingan (Christiaens et al., 2015). Dibandingkan dengan instrumen fiskal lainnya, seperti perencanaan anggaran atau manajemen utang, akuntansi publik lebih bersifat sistemik karena mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan dalam mendukung kebijakan fiskal jangka panjang (Bergmann, 2009).

Dalam konteks kajian ini, variabel utama yang dikaji adalah akuntansi publik dan fiskal sustainability. Keduanya memiliki keterkaitan erat, di mana praktik akuntansi publik yang transparan dan berbasis akrual diyakini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga mendukung perencanaan fiskal yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Cohen & Karatzimas, 2017). Akuntansi publik yang berkualitas memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti dan memfasilitasi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi fiskal negara secara jangka panjang.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas keterkaitan antara akuntansi publik dan transparansi fiskal, namun belum banyak yang mengulas secara sistematis bagaimana akuntansi publik dapat menjadi instrumen dalam memperkuat fiskal sustainability secara teoritis maupun empiris. Misalnya, studi oleh Brusca, Caperchione, Cohen, dan Manes-Rossi (2016) menekankan pentingnya adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dalam meningkatkan transparansi fiskal, namun belum mengeksplorasi secara mendalam dampaknya terhadap kesinambungan fiskal jangka panjang. Studi terbaru oleh Jorge, Brusca, dan Montesinos (2022) menunjukkan adanya korelasi antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian defisit, namun penelitian ini masih terbatas pada konteks negara-negara Eropa. Dengan demikian, terdapat celah penelitian dalam memahami hubungan ini secara komprehensif di tingkat global maupun dalam konteks negara berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji akuntansi publik tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan fiskal sustainability. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi sektor publik serta memberikan panduan praktis

bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan ketahanan fiskal melalui reformasi pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara teoritis dan empiris peran akuntansi publik dalam memperkuat fiskal sustainability, serta menyusun model konseptual yang dapat diimplementasikan dalam konteks kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Akuntansi Publik

Akuntansi publik merupakan sistem pencatatan dan pelaporan informasi keuangan yang digunakan oleh entitas pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi terhadap publik. Akuntansi publik tidak hanya bertugas mencatat transaksi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan dan dasar pengambilan keputusan publik (Chan, 2003). Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai sejauh mana anggaran negara telah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan. Dalam konteks global, praktik akuntansi sektor publik terus berkembang seiring dengan adopsi standar internasional seperti IPSAS dan sistem berbasis akrual, yang memungkinkan pencatatan lebih lengkap atas aset dan kewajiban pemerintah (Lüder & Jones, 2003).

Peran akuntansi publik menjadi semakin krusial di era desentralisasi fiskal, di mana pengelolaan anggaran berada pada tingkat pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi, akuntansi publik menjadi jembatan informasi untuk menyeimbangkan kebutuhan antara pusat dan daerah serta menjamin transparansi fiskal lintas level pemerintahan (Benito et al., 2007). Dengan demikian, akuntansi publik tidak hanya berdampak pada efisiensi administrasi keuangan, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola fiskal.

Fiscal Sustainability

Fiscal sustainability atau kesinambungan fiskal merujuk pada kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya saat ini dan di masa depan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan anggaran jangka panjang atau akumulasi utang yang tidak terkendali (Blanchard et al., 1990). Indikator umum yang digunakan untuk menilai sustainability fiskal meliputi rasio utang terhadap PDB, keseimbangan primer, serta kemampuan membayar bunga utang. Dalam jangka panjang, keberlanjutan fiskal menjadi tolok ukur kesehatan makroekonomi suatu negara dan mempengaruhi kepercayaan investor, stabilitas moneter, serta kredibilitas pemerintah.

Dalam kerangka pengelolaan keuangan publik, fiscal sustainability dapat dicapai melalui perencanaan anggaran jangka menengah, pembatasan defisit, serta peningkatan efisiensi belanja negara (Escolano, 2010). Penelitian menunjukkan bahwa transparansi fiskal dan kualitas informasi keuangan memiliki korelasi positif terhadap kesinambungan fiskal, karena memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih berbasis data dan akurat (Debrun & Kumar, 2007).

Pengembangan Hipotesis

Hubungan antara Akuntansi Publik dan Fiscal Sustainability

Teori akuntabilitas publik menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang dapat dipahami dan diverifikasi oleh publik untuk

memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel (Roberts & Scapens, 1985). Dalam konteks ini, akuntansi publik memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan kontrol sosial atas pengelolaan fiskal. Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dan transparan diyakini mampu meningkatkan efektivitas dalam perencanaan fiskal dan menghindari praktik fiskal yang tidak berkelanjutan (Pina & Torres, 2003).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi standar pelaporan akuntansi sektor publik secara konsisten cenderung memiliki keseimbangan fiskal yang lebih stabil (Bergmann et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh tersedianya informasi yang lebih akurat terkait kewajiban dan aset pemerintah, sehingga pengambilan keputusan fiskal dapat dilakukan secara lebih prudent.

H1: Akuntansi publik yang berkualitas berpengaruh positif terhadap fiscal sustainability dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Peran Transparansi Informasi Akuntansi sebagai Mediator

Transparansi informasi akuntansi merupakan aspek integral dalam penguatan akuntansi publik dan berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara akuntansi publik dan fiscal sustainability. Teori agensi menyatakan bahwa asimetri informasi antara principal (masyarakat) dan agent (pemerintah) dapat dikurangi melalui transparansi pelaporan, sehingga memperkecil kemungkinan moral hazard dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih bertanggung jawab (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cuadrado-Ballesteros et al. (2017), ditemukan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berkorelasi positif terhadap stabilitas fiskal dan pengendalian defisit anggaran. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi, semakin besar pula akuntabilitas fiskal yang dapat dicapai oleh entitas publik. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi variabel kunci yang menghubungkan praktik akuntansi publik dengan tujuan jangka panjang fiscal sustainability.

H2: Transparansi informasi akuntansi memediasi pengaruh antara akuntansi publik dan fiscal sustainability.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* dengan metode deskriptif kualitatif. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara akuntansi publik dan *fiscal sustainability* melalui pengumpulan dan analisis sistematis terhadap teori-teori serta temuan empiris dari literatur terdahulu. Pendekatan deskriptif kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena multidimensi yang tidak selalu dapat dikuantifikasi secara langsung, khususnya dalam konteks tata kelola keuangan publik. Kajian ini tidak hanya menyajikan rangkuman dari hasil-hasil studi sebelumnya, tetapi juga menyusun pemetaan tematik dan sintesis konseptual berdasarkan variabel-variabel utama. Proses sistematis yang diterapkan mengikuti panduan *Systematic Literature Review (SLR)* sebagaimana dikembangkan oleh Tranfield, Denyer, dan Smart (2003), yang menekankan pada transparansi, keterulangan, dan validitas metodologis. Pendekatan ini juga memperhatikan standar literatur ilmiah terkini sebagaimana disarankan oleh Snyder (2019), agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik.

Instrumen Penelitian

Akuntansi Publik dan Fiscal Sustainability.....

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa formulir seleksi literatur dan lembar ekstraksi data. Formulir seleksi literatur disusun untuk mengidentifikasi dan menyaring artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, seperti topik, tahun publikasi, jenis jurnal, dan kelengkapan data. Sementara itu, lembar ekstraksi data digunakan untuk mencatat informasi penting dari masing-masing artikel, termasuk judul, nama penulis, tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, dan keterkaitannya dengan variabel akuntansi publik maupun *fiscal sustainability*. Instrumen ini dirancang mengikuti rekomendasi dari Kitchenham dan Charters (2007), yang menyarankan penerapan alat bantu sistematis dalam pelaksanaan *systematic review* agar hasil kajian lebih konsisten dan dapat direplikasi. Instrumen ini juga berfungsi sebagai dasar dalam proses analisis isi yang akan dilakukan secara tematik dan terstruktur.

Sumber Data, Lokasi, dan Waktu

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, prosiding konferensi, buku referensi akademik, serta dokumen resmi dari lembaga seperti International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Literatur yang dikaji dipublikasikan dalam rentang waktu 2003 hingga 2023 guna mencakup perkembangan terbaru terkait praktik akuntansi publik dan isu-isu keberlanjutan fiskal. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui database akademik yang kredibel, antara lain Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Emerald Insight, dan Google Scholar untuk literatur internasional, serta database Sinta untuk literatur nasional. Pencarian dilakukan selama periode April hingga Juni 2023, dengan menggunakan kata kunci gabungan seperti “public sector accounting”, “fiscal sustainability”, “public financial transparency”, dan “government accountability”. Proses pencarian dilakukan secara sistematis dan direkam menggunakan perangkat lunak manajemen referensi agar seleksi data dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Seleksi Literatur

Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi substansial terhadap fokus kajian, dengan mengacu pada kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi mencakup: (1) artikel berbahasa Inggris atau Indonesia, (2) dipublikasikan dalam jurnal terindeks nasional (minimal SINTA 2) maupun internasional (Scopus atau Web of Science), (3) memuat pembahasan eksplisit terkait akuntansi publik, *fiscal sustainability*, atau transparansi informasi fiskal, serta (4) dapat diakses secara penuh.

Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel non-peer-reviewed, literatur duplikat atau tidak tersedia secara lengkap, serta artikel yang tidak menyampaikan metodologi secara jelas. Proses seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pencarian awal, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, kemudian ditinjau ulang secara penuh. Hasil akhir dari seleksi tersebut menghasilkan 40 artikel ilmiah yang layak dianalisis, terdiri dari 20 artikel nasional dan 20 artikel internasional, yang mencerminkan keragaman konteks dan pendekatan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis* atau analisis isi, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan konseptual antar variabel berdasarkan literatur yang dikaji. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Tahap pertama, reduksi data, dilakukan dengan mengekstraksi informasi yang relevan dari masing-masing artikel, seperti fokus pembahasan, metode, dan hasil. Tahap kedua, penyajian data, melibatkan pengelompokan artikel berdasarkan kesamaan tema atau

variabel, termasuk pendekatan metodologis dan konteks geografisnya. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menyusun sintesis naratif yang merepresentasikan keterkaitan antara akuntansi publik, transparansi informasi, dan fiscal sustainability. Proses ini dilengkapi dengan verifikasi silang antar sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Analisis dilakukan secara manual dengan dukungan perangkat lunak Zotero dan Mendeley sebagai alat bantu manajemen referensi, serta Microsoft Excel untuk mengorganisasi data ekstraksi. Teknik ini dirancang sesuai dengan pedoman analisis isi kualitatif yang dijelaskan oleh Bengtsson (2016), yang menekankan ketelitian dan transparansi dalam proses interpretatif.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mereview secara sistematis sebanyak 40 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 artikel berasal dari jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science, dan 20 artikel lainnya berasal dari jurnal nasional yang terindeks SINTA 2 atau lebih tinggi. Literatur yang dianalisis diterbitkan dalam rentang waktu 2003 hingga 2023, mencerminkan perkembangan konseptual dan praktik yang signifikan dalam bidang akuntansi publik dan keberlanjutan fiskal.

Analisis awal menunjukkan bahwa topik-topik yang dibahas dalam literatur dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori tematik utama, yaitu:

- (1) Implementasi akuntansi publik berbasis akrual,
- (2) Transparansi fiskal dan efisiensi anggaran,
- (3) Standar pelaporan internasional (IPSAS),
- (4) Akuntansi publik dan pengendalian utang, serta
- (5) Peran akuntansi publik dalam tata kelola fiskal daerah.

Adapun distribusi temuan berdasarkan tema dan rujukan kunci dirangkum pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Temuan Utama dalam Kajian Literatur Sistematis

Tema Utama	Temuan Inti	Referensi Kunci
Transparansi Akuntansi Publik	Akuntansi akrual meningkatkan kualitas dan kelengkapan informasi fiskal	Pina & Torres (2003); OECD (2017)
Akuntansi Publik dan Pengendalian Utang	IPSAS membantu mengungkapkan kewajiban fiskal jangka panjang secara akurat	Bergmann et al. (2020)
Kualitas Pelaporan dan Defisit	Pelaporan yang berkualitas berkorelasi positif dengan pengendalian defisit dan efisiensi anggaran	Cuadrado-Ballesteros et al. (2017)
Transparansi sebagai Mediasi	Keterbukaan informasi publik memediasi hubungan antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan fiskal	Jorge et al. (2022); Setiawan & Rakhmat (2020)
Akuntansi Publik dalam Konteks Lokal	Akuntansi publik memperkuat kapasitas tata kelola fiskal di daerah melalui transparansi dan partisipasi	Winarno & Sunaryati (2018); Andriani (2021)

Pembahasan

Akuntansi Publik sebagai Pilar Transparansi Fiskal

Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntansi publik memiliki peran fundamental sebagai instrumen penguatan transparansi fiskal. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah menyajikan informasi keuangan secara menyeluruh, mencakup transaksi kas, aset tetap, kewajiban jangka panjang, hingga komitmen kontraktual yang berdampak pada fiskal masa depan. Model pelaporan ini dinilai lebih mencerminkan kondisi fiskal sesungguhnya dibandingkan model berbasis kas (Pina & Torres, 2003).

Laporan OECD (2017) juga menyatakan bahwa negara yang menerapkan akuntansi akrual cenderung memiliki tingkat transparansi fiskal yang lebih tinggi dan kredibilitas fiskal yang lebih baik di mata pasar dan publik. Dalam konteks Indonesia, studi oleh Winarno dan Sunaryati (2018) menemukan bahwa akuntansi berbasis akrual yang diterapkan pada pemerintah daerah meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperluas partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Namun demikian, kendala yang masih mengemuka adalah keterbatasan kompetensi SDM, lemahnya integrasi sistem informasi keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan data akuntansi dalam perencanaan anggaran.

Hubungan Akuntansi Publik dan Fiskal Sustainability: Perspektif Teoretis dan Empiris

Akuntansi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai penopang utama kebijakan fiskal berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa terdapat tiga mekanisme kunci di mana akuntansi publik mempengaruhi fiskal sustainability, yakni:

- (1) Menyediakan informasi fiskal jangka panjang,
- (2) Mengukur utang dan kewajiban pemerintah secara akurat, dan
- (3) Mendukung disiplin anggaran berbasis data.

Studi oleh Bergmann et al. (2020) menegaskan bahwa adopsi IPSAS membantu pemerintah untuk mengidentifikasi potensi risiko fiskal tersembunyi dan mendorong pengelolaan utang yang lebih berhati-hati. Sementara itu, Cuadrado-Ballesteros et al. (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan publik sangat berpengaruh dalam menekan defisit anggaran, khususnya di negara-negara OECD.

Studi Andriani (2021) dalam konteks Indonesia menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa informasi keuangan yang akurat memungkinkan daerah menyusun rencana fiskal secara realistis dan mencegah terjadinya defisit struktural akibat kesalahan asumsi fiskal.

Transparansi Informasi sebagai Variabel Mediasi

Transparansi informasi muncul sebagai faktor mediasi yang sangat signifikan dalam memperkuat hubungan antara akuntansi publik dan fiskal sustainability. Jorge et al. (2022) menjelaskan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas melakukan evaluasi fiskal secara independen. Keterbukaan informasi ini menciptakan tekanan eksternal yang efektif bagi pemerintah untuk mempertahankan disiplin anggaran dan menghindari pemborosan fiskal.

Setiawan dan Rakhmat (2020) dalam studi empiris di Indonesia membuktikan bahwa daerah dengan tingkat keterbukaan informasi keuangan yang tinggi cenderung lebih mampu menjaga keseimbangan anggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Oleh karena itu, akuntansi publik yang baik hanya akan berdampak

optimal terhadap keberlanjutan fiskal apabila disertai dengan sistem transparansi yang terbuka, dapat diakses, dan dipahami oleh publik.

CONCLUSIONS

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran akuntansi publik sebagai instrumen dalam memperkuat fiscal sustainability. Berdasarkan hasil analisis terhadap 40 artikel ilmiah yang terseleksi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi publik memegang peran sentral dalam menciptakan transparansi fiskal, meningkatkan akuntabilitas, dan menyediakan informasi keuangan yang relevan untuk mendukung perencanaan fiskal jangka panjang.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah untuk menyajikan kondisi fiskal secara lebih komprehensif, termasuk pengungkapan aset dan kewajiban yang berdampak pada keberlanjutan fiskal. Selain itu, transparansi informasi terbukti menjadi variabel mediasi yang signifikan antara kualitas akuntansi publik dan pencapaian fiscal sustainability. Tanpa adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses dan dipahami publik, kontribusi akuntansi publik terhadap disiplin fiskal menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, peran strategis akuntansi publik tidak hanya terbatas pada pelaporan teknis, melainkan juga sebagai instrumen penguatan tata kelola fiskal negara yang berkelanjutan.

Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks hubungan antara sistem informasi akuntansi, transparansi fiskal, dan keberlanjutan fiskal. Hasil kajian memperkuat teori akuntabilitas dan teori agensi yang menyatakan bahwa sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipercaya dapat memperkuat kontrol sosial serta memperkecil potensi penyimpangan fiskal oleh pemerintah. Selain itu, temuan ini memperluas pemahaman bahwa fiscal sustainability tidak hanya bersumber dari kebijakan fiskal,

Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam praktik akuntansi publik, yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur, integrasi sistem informasi keuangan, serta penerapan standar pelaporan internasional seperti IPSAS. Pemerintah pusat dan daerah perlu memanfaatkan informasi akuntansi tidak hanya sebagai alat pelaporan administratif, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam pelaporan keuangan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung disiplin fiskal yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian ini hanya menggunakan data sekunder dari publikasi ilmiah dan laporan lembaga resmi, sehingga tidak mencakup perspektif primer dari praktisi atau pembuat kebijakan. Kedua, ruang lingkup kajian dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam rentang 2003–2024, yang meskipun representatif, tetap memungkinkan terlewatnya beberapa literatur relevan di luar rentang tersebut. Ketiga, konteks geografis dan kebijakan dalam artikel yang dikaji sangat bervariasi, sehingga generalisasi hasil ke satu negara tertentu, termasuk Indonesia, harus dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan konteks lokal.

Penelitian ini merekomendasikan agar studi-studi selanjutnya mengadopsi pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor kunci seperti auditor pemerintah, pejabat fiskal, dan

akademisi. Selain itu, penelitian masa depan perlu menelaah lebih spesifik bagaimana sistem akuntansi publik diimplementasikan pada level operasional daerah atau sektor tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengembangkan model evaluatif atau kerangka kerja pengukuran keterkaitan antara akuntansi publik dan fiscal sustainability yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai alat monitoring dan perencanaan fiskal.

Reference:

- Andriani, R. (2021). Transparansi laporan keuangan dan implikasinya terhadap defisit anggaran daerah. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 6(2), 134–145.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>
- Benito, B., Brusca, I., & Montesinos, V. (2007). The harmonization of government financial information systems: The role of the IPSAS. *International Review of Administrative Sciences*, 73(2), 293–307. <https://doi.org/10.1177/0020852307077954>
- Bergmann, A. (2009). *Public sector financial management*. Pearson Education.
- Bergmann, A., Fuchs, S., & Götz, R. (2020). Public sector accounting and fiscal sustainability: Does accrual accounting make a difference? *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(4), 643–661. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2020-0063>
- Blanchard, O., Chouraqui, J. C., Hagemann, R. P., & Sartor, N. (1990). The sustainability of fiscal policy: New answers to an old question. *OECD Economic Studies*, 15, 7–36. https://doi.org/10.1787/eco_studies-v1990-art3-en
- Brusca, I., Caperchione, E., Cohen, S., & Manes-Rossi, F. (2016). *Public sector accounting and auditing in Europe: The challenge of harmonization*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137461340>
- Chan, J. L. (2003). Government accounting: An assessment of theory, purposes and standards. *Public Money & Management*, 23(1), 13–20. <https://doi.org/10.1111/1467-9302.00336>
- Christiaens, J., Reyniers, B., & Rolle, C. (2015). Impact of IPSAS on reforming governmental financial reporting: A comparative study. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 158–177. <https://doi.org/10.1177/0020852314566004>
- Cohen, S., & Karatzimas, S. (2017). Accounting information and accountability in times of crisis: The case of Greece. *International Journal of Public Administration*, 40(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1075562>
- Cuadrado-Ballesteros, B., García-Sánchez, I. M., & Prado-Lorenzo, J. M. (2017). The role of public financial reporting quality in public sector sustainability. *Sustainability*, 9(2), 234. <https://doi.org/10.3390/su9020234>
- Debrun, X., & Kumar, M. S. (2007). The discipline-enhancing role of fiscal institutions: Theory and empirical evidence. *IMF Working Paper* 07/171. <https://doi.org/10.5089/9781451867420.001>
- Escolano, J. (2010). A practical guide to public debt dynamics, fiscal sustainability, and cyclical adjustment of budgetary aggregates. *IMF Technical Notes and Manuals* 2010/02. <https://doi.org/10.5089/9781455205150.005>
- International Monetary Fund. (2022). *Fiscal Monitor: Managing government support for firms*. <https://doi.org/10.5089/9781513595884.081>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Jorge, S., Brusca, I., & Montesinos, V. (2022). The usefulness of financial reporting for decision-making in local governments: A comparative study. *Public Money & Management*, 42(5), 365–374. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1840766>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering* (EBSE Technical Report). Keele University. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.117.471>
- Lüder, K. G., & Jones, R. (Eds.). (2003). *Reforming governmental accounting and budgeting in Europe*. Frankfurt: Fachverlag Moderne Wirtschaft.
- OECD. (2017). *Accrual practices and reform experiences in OECD countries: Results of the 2016 OECD accruals survey*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264280366-en>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pina, V., & Torres, L. (2003). Reshaping public sector accounting: An international comparative view. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 20(4), 334–350. <https://doi.org/10.1111/j.1936-4490.2003.tb00613.x>
- Roberts, J., & Scapens, R. (1985). Accounting systems and systems of accountability – Understanding accounting practices in their organizational contexts. *Accounting, Organizations and Society*, 10(4), 443–456. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(85\)90005-4](https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90005-4)
- Setiawan, I., & Rakhmat, M. R. (2020). Transparansi keuangan daerah dan keseimbangan anggaran: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1), 37–52. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v6i1.435>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Winarno, A., & Sunaryati, S. (2018). Pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1), 29–42.